

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur
Telp./Fax. (0321) 321 953

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, sedangkan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan. Rancangan awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini dapat memberikan arah pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. Nugraha Budhi Sulistya, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196909151989031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penyusunan	8
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	11
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	48
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	50
3.2.1. Tujuan	50
3.2.2. Sasaran	50
3.3. Program dan Kegiatan	50
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat	68
BAB V Penutup	81
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	81
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	83
5.3 Rencana Tindak Lanjut	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto	23
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto	31
Tabel 2.4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto	47
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Mojokerto	55
Tabel 4.1 Matrik Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan : a. *persiapan penyusunan*; b. *penyusunan rancangan awal*; c. *penyusunan rancangan*; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua agar disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025. Sedangkan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tanggal 26 Agustus 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
38. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 tanggal 22 September 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 101 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto;
40. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
41. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto nomor 188.4/33/416-206/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto;
42. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto nomor **188.4/505/416-206/2023** tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif serta sumber pendanaan;
2. untuk merumuskan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan segenap pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam menyusun berbagai kebijakan, maupun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025;
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan pada akhir tahun anggaran atau sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Ranwal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD/PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Hambatan, Tantangan dan Peluang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemaangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada bagian ini membahas faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya terdapat 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Adapun ikhtisar realisasi capaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 98,50 % sebagaimana rincian berikut :

Anggaran sebelum P-APBD	: Rp. 71.322.399.901,00
Pengurangan Anggaran	: <u>Rp. 220.439.000,00 -</u>
Jumlah Anggaran setelah P-APBD	: Rp. 71.101.960.901,00
Realisasi Anggaran	: <u>Rp. 70.034.881.896,67 -</u>
Sisa Lebih/(Kurang)	: <u>Rp. 1.067.079.004,33</u>

Sedangkan untuk tahun anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto mendapatkan pagu anggaran sementara sebesar Rp. 12.362.818.053,00 (*dua belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu lima puluh tiga rupiah*), dengan rincian 6 program, 10 kegiatan, dan 30 sub kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	Unsur Pemerintahan Umum									
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79,50	79,63	98,84	81,57		
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1		1	1	100	1		
8.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target</i>	90		90,00	83,33	98,51	90,00		
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dok	2 Dok	100	2		
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dok	6 Dok	100	6		
8.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</i>	73,20		90,00	96,94	81,33	98,50		
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang		16 orang	16 orang	100	16		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	82,00		82,00	100	121,95	97,00		
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket		2 Paket	2 Paket	100	2 Paket		
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100	4 Paket		
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		4 Paket	4 Paket	100	4 Paket		
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen		1 dok	1 dok	100	1 dok		
8.01.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4 paket		4 paket	4 paket	100	4 paket		
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Lap	12 Lap	100	12 Lap		
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100		100	100	100	99,25		
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit		2 Unit	2 unit	100	-		
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	93,00		93,00	100	107,53	93,00		
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan		12 Lap	12 Lap	100	12 Lap		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Lap	12 Lap	100	12 Lap		
8.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	91,00		91,00	86,67	95,24	91,95		
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit		6 unit	6 unit	100	6 unit		
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	1 unit	100	1 unit		
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit		7 unit	7 unit	100	7 unit		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	83,00		83,00	91,67	110,45	85,00		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2		3	3	100	3		
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	562	-	282	282	100	280		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400		200	200	100	200		
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2		1	1	100	1		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	168	-	84	84	100	84		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	78,66		78,66	91,67	116,54	84,06		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3		3	3	100	3		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100		50	50	100	65		
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100		40	40	100	100		
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4		17	15	88,24	4		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif	97,00		97,00	98,72	101,77	97,05		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar	215		215	155	72,09	215		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300		300	300	100	300		
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155		15	15	100	155		
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3	-	1	1	100	3		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama	20		20		100	15		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan/ Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1		1	1	100	2		
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200		200	200	100	200		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	75		75,00	73,33	97,77	88,95		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	20		12	12	100	15		
8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			1	1	100	1		
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			1	1	100			
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8		255	255	100	255		

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	224	168	56	56	100	56		
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4		4	3	75,00	4		
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4 dok	3 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mojokerto, bab II pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menurut Peraturan Bupati Mojokerto nomor 101 tahun 2021 bab II pasal 2 ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan/ mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto,
- b. Mekanisme kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya jumlah tenaga/ pegawai yang menguasai bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Belum tersedianya data-data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar–benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Sedangkan analisis kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, bela Negara dan wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai luhur demi terciptanya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Mojokerto dalam kondisi yang heterogen (suku, agama, ras, dan antar golongan).

2. Meningkatnya keamanan, ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
3. Meningkatnya iklim demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat di daerah, menyelenggarakan mediasi, fasilitasi, dan komunikasi bagi institusi masyarakat serta masyarakat itu sendiri agar memiliki pemahaman yang baik mengenai betapa pentingnya penyaluran aspirasi politik yang demokratis dan bertanggungjawab.
4. Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas/ LSM guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel 2.2 pada halaman berikut.

Tabel 2.2
(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-30)
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MOJOKERTO**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (Thn n-2)	2024 (Thn n-1)	2025 (Thn n)	2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Th n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Menurunnya Kejadian Konflik umat beragama dan Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto			42,50%	27%	26,75%	26,50%	29,41%		26,75%	26,50%	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			79,61	81,57	81,65	81,75	79,63	81,57	81,65	81,75	
3	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			91,50	96,95	97,00	97,15	96,94	98,50	97,00	97,15	
4	Indeks Profesionalitas ASN			90,00	90,15	90,20	90,25	89,94	84	90,20	90,25	
5	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;
2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;
3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya kultur asing yang bebas;
6. Perubahan peraturan perundang– undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah;
7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;
8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Badan Kesbang dan Politik.

Disamping itu dalam penyusunan rencana awal rencana kerja (Ranwal Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, dilakukan terlebih dahulu evaluasi, inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan dan kebijakan pelaksanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Mojokerto yang dirumuskan menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting lainnya, antara lain :

1. Isu melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme;
Menjadi sebuah bangsa yang memegang teguh jati diri merupakan cita-cita besar yang patut diperjuangkan. Bangsa yang setiap elemen masyarakatnya memegang teguh jati diri tidak kehilangan arah dalam berkehidupan apabila selalu menjadikan Pancasila sebagai nilai luhur yang kental dengan sejarah perjuangan bangsa. Seiring berjalannya

waktu Pancasila sebagai idiologi mulai melemah dalam pengamalannya disebabkan karena beberapa faktor penyebab melemahnya nilai-nilai Pancasila, antara lain:

- a. Lemahnya pada penghayatan, pemahaman, dan pengamalan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara.
 - b. Kesadaran hukum dan konstitusi.
 - c. Lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d. Kurangnya toleransi sesama anak bangsa.
2. Isu melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, berbudaya di masyarakat;
Dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui keberagaman dalam agama dan berbudaya itu benar adanya. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Oleh karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama dan berbudaya harus selalu dijaga, dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama yang berbeda dan dianut oleh orang lain.
 - b. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan oleh yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda.
 - c. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia.
 - d. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya dan merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri.
3. Isu rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi
Lebih dari satu dekade, Indonesia mendorong kebijakan afirmatif dengan menerapkan kuota minimal keterwakilan perempuan di parlemen. Tujuannya menjembatani kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Namun, hingga kini, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan politik masih rendah ini disebabkan karena pada kenyataannya tidak terlalu banyak perempuan yang terjun ke dunia politik karena faktor kultur yang belum membuka ruang luas bagi keterlibatan perempuan.
Hal itu juga disebabkan keterbatasan modal sosial, politik, dan finansial perempuan. Padahal, keterwakilan perempuan dalam politik formal dibutuhkan untuk memperkuat upaya untuk melahirkan peraturanyang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan perempuan.
4. Isu melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental);
Revolusi mental, tidak terlepas dari krisis mental atau kepribadian bangsa, Politik penyeragaman pada masa lalu dinilai telah mengikis karakter Indonesia dan meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi.

5. Isu kurangnya semangat gotong royong;

Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong, kebersamaan dan bahu membahu. Setelah reformasi semangat tersebut seperti agak ditinggalkan. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Di beberapa desa bahkan secara nyata uang menjadi perusak semangat gotong royong warga desa. Kehadiran dalam sebuah kebersamaan pun terkadang diwakili dengan uang, contoh kecil seperti misalkan tidak hadir ronda cukup bayar denda, tidak hadir dalam pertemuan cukup titip uang iuran dan tidak ikut kerja bakti cukup memberi sumbangan.

6. Isu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan;

Peran serta masyarakat akan sangat berarti dalam mewujudkan kondisi yang aman dan nyaman dalam masyarakat akan sangat berarti dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan amanah yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu kewajiban mereka sebagai warga negara seperti yang telah diatur pada kedua Bab XII Pasal 30 yaitu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dalam hal ini masyarakat kurang menyadari hal tersebut, sehingga perlunya memberikan pemahaman, pendidikan dan pengajaran arti pentingnya peran serta mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara.

2.3.1 Dampaknya Terhadap Pencapaian Program Secara Nasional

1. Dengan melemahnya pengamalan Nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme berdampak pada fenomena kecenderungan perilaku dan kepribadian bangsa semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila, dan kehilangan jati diri sebagai suatu individu yang berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2. Dengan melemahnya nilai-nilai toleransi dalam beragama, dan berbudaya di masyarakat akan menimbulkan kerawanan, dalam hal ini pemahaman akan pentingnya menanamkan nilai-nilai toleransi yang mulai terkikis perlu untuk digalakkan kembali, karena :
 - 1) Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi;
 - 2) Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama tentang agamanya sendiri dan agama pihak lain;
 - 3) Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain;
 - 4) Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat;

- 5) Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah;
- 6) Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat.
3. Rendahnya politik perempuan dalam berdemokrasi menggambarkan bahwa peran perempuan dan laki-laki belum seimbang.
4. Melemahnya kepribadian bangsa menuju karakter yang lebih unggul (revolusi mental), berakibat krisis mental.
5. Dampak Kurangnya semangat gotong royong akan tingginya sifat individualisme.
6. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan, akibatnya keamanan tidak terkendali.

2.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026, Visi Kabupaten Mojokerto adalah “***Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia***”. Visi Pembangunan tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021–2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Yang memiliki arti :

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- c. bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor.
- d. bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Visi Pembangunan Kabupaten Mojokerto tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya. Dukungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terwujud melalui misi 1, “***Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan***”. Pada misi ini bertujuan mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi ini mencakup upaya-upaya

dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, daya beli, pembangunan gender, kesalehan dan kerukunan umat beragama. Dengan sasaran meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bersinggungan langsung dengan sasaran perangkat daerah, yaitu Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan serta diukur dengan indikator persentase menurunnya kejadian konflik umat beragama dan konflik sosial di Kabupaten Mojokerto.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Tantangan

Tantangan (*treaths*) yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam pengembangan pelayanan tahun 2025, antara lain :

1. Masih adanya potensi Kerawanan Konflik SARA.
2. Masih banyaknya Ormas dan LSM yang belum berbadan Hukum.
3. Kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Umum.
4. Kurangnya Komunikasi antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
5. Kurangnya pemahaman kelompok masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara
6. Semakin meningkatnya jumlah partai politik, LSM dan Ormas yang ada di lingkungan masyarakat.
7. Masyarakat semakin kritis dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka terhadap kinerja pemerintah dan partai politik;
8. Kurangnya lembaga keagamaan berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

b. Peluang

Peluang-peluang (*opportunities*) pengembangan pelayanan tahun 2025 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, antara lain :

1. Otonomi Daerah;
2. Sumber Daya Manusia yang memadai;
3. Masyarakat yang masih memiliki jiwa toleransi;
4. Peran serta masyarakat yang tinggi;
5. Sikap gotong royong dan dukungan dari pemerintah daerah;
6. Tersedianya stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan daerah;
7. Banyaknya Ormas, LSM, dan Partai Politik;
8. Banyaknya alim ulama dan tokoh masyarakat;

9. Empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tercantum di dalam RPJPD dilaksanakan sesuai dengan analisis kebutuhan. Dalam Rancangan Awal RKPD ini akan tercantum beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak ada perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Kesbangpol. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi perangkat daerah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto disusun sebagai landasan dasar dalam menentukan kebijakan strategis dengan harapan mampu memecahkan sebagian persoalan yang dihadapi khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang harus dilakukan Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan Daerah, Nasional maupun global. Perbandingan dilakukan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang timbul agar capaian kinerja sampai dengan 5 (lima) tahun dapat tercapai.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Ruang lingkup perencanaan pembangunan ini bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Bupati Mojokerto. Pengukuran pencapaian rencana dan target

yang telah ditetapkan di rencana kerja secara kontinyu dilakukan agar diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,47	3.350.358.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,47	3.350.358.000	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1		
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	75,50	15.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	75,50	15.000.000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	7.500.000	
	<i>Penyusunan Renstra</i>					<i>Penyusunan Renstra</i>					
	<i>Penyusunan Renja dan Renja-P</i>					<i>Penyusunan Renja dan Renja-P</i>					
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok	7.500.000	
	<i>Penyusunan Laporan Evaluasi Renja (Triwulan)</i>					<i>Penyusunan Laporan Evaluasi Renja (Triwulan)</i>					

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan LKjIP					Penyusunan LKjIP					
	Penyusunan SAKIP					Penyusunan SAKIP					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,95	2.853.108.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,95	2.853.108.000	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bln	2.853.108.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/ bln	2.853.108.000	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				1.154.944.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				1.154.944.000	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				113.176.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				113.176.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				177.485.000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				177.485.000	
	Belanja Tunjangan Umum PNS				96.500.000	Belanja Tunjangan Umum PNS				96.500.000	
	Belanja Tunjangan Beras PNS				11.137.000	Belanja Tunjangan Beras PNS				11.137.000	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				56.268.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				56.268.000	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS				4.440.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS				4.440.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				113.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				113.000	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				2.772.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				2.772.000	
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				8.316.000	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS				8.316.000	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS				5.775.000	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS				5.775.000	
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan				1.131.600.000	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan				1.131.600.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	83,00	202.250.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	83,00	202.250.000	
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	70.000.000	
	<i>Belanja Perlengkapan studio Podcast :</i>					<i>Belanja Perlengkapan studio Podcast :</i>					
	<i>Mic</i>					<i>Mic</i>					
	<i>Audio Mixer 6 channel</i>					<i>Audio Mixer 6 channel</i>					
	<i>Komputer PC / Laptop</i>					<i>Komputer PC / Laptop</i>					
	<i>Handsat</i>					<i>Handsat</i>					
	<i>Mic klip on wireless</i>					<i>Mic klip on wireless</i>					
3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.000.000	
	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>				<i>15.000.000</i>	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>				<i>15.000.000</i>	
3.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
	<i>Belanja Barang Cetak</i>				<i>7.000.000</i>	<i>Belanja Barang Cetak</i>				<i>7.000.000</i>	
	<i>Belanja Penggandaan/ Fotocopy</i>				<i>3.000.000</i>	<i>Belanja Penggandaan/ Fotocopy</i>				<i>3.000.000</i>	
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dok	7.250.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dok	7.250.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Belanja Langganan Surat Kabar</i>				2.250.000	<i>Belanja Langganan Surat Kabar</i>				2.250.000	
	<i>Belanja Jasa Iklan/Reklame</i>				5.000.000	<i>Belanja Jasa Iklan/Reklame</i>				5.000.000	
3.5	Penyediaan Bahan / Material	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	
	<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>				20.000.000	<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>				20.000.000	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	80.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	80.000.000	
	<i>Perjalanan Dinas Biasa</i>				55.000.000	<i>Perjalanan Dinas Biasa</i>				55.000.000	
	<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>				25.000.000	<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>				25.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	155.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100%	155.000.000	
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	11.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	11.000.000	
	<i>Biaya Rekening Telepon dan TV Berlangganan</i>				11.000.000	<i>Biaya Rekening Telepon dan TV Berlangganan</i>				11.000.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	144.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bakesbangpol Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	144.000.000	
	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>			2 orang	48.000.000	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>			2 orang	48.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Administrasi umum			3 orang	72.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi umum			3 orang	72.000.000	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi			1 orang	24.000.000	Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi			1 orang	24.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	95	125.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	95	125.000.000	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	35.000.000	
	Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (BBM, Servis, dll)				18.918.400	Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (BBM, Servis, dll)				18.918.400	
	Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional				6.331.600	Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional				6.331.600	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				9.750.000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				9.750.000	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi baik	1 unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	75.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor					
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	15.000.000	
	Servis AC										

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Servis Laptop										
	Servis PC										
	Servis Printer										
	Servis Meubelir										
	Servis Sound System										
	Servis Alat Penghancur Kertas										
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase Konflik Umat Beragama / Penganut Kepercayaan dan Suku / Etnis	85,09%	3.400.000.000	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kab Mojokerto	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,09%	3.400.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan	6 sub Keg	3.400.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab Mojokerto	Jml sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 sub Keg	3.400.000.000	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 orang	800.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400 orang	800.000.000	
	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)			100 orang	250.000.000	Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)			100 orang	250.000.000	
	Rakor Tim Gugus Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)			100 orang	150.000.000	Rakor Tim Gugus Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)			100 orang	150.000.000	
	Pembinaan Bela Negara			200 orang	400.000.000	Pembinaan Bela Negara			200 orang	400.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	380 orang	900.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	380 orang	900.000.000	
	<i>Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda</i>			100 orang	300.000.000	<i>Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda</i>			100 orang	300.000.000	
	<i>Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</i>			100 orang	200.000.000	<i>Implementasi Nilai-Nilai Pancasila</i>			100 orang	200.000.000	
	<i>Rapat Koordinasi Tim Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</i>			80 orang	200.000.000	<i>Rapat Koordinasi Tim Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)</i>			80 orang	200.000.000	
	<i>Pemantapan Pembauran Kebangsaan (FPK)</i>			100 orang	200.000.000	<i>Pemantapan Pembauran Kebangsaan (FPK)</i>			100 orang	200.000.000	
1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Lap	400.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Lap	400.000.000	
	<i>Penyelenggaraan Parade Forum Pembauran Kebangsaan</i>			1 Lap	200.000.000	<i>Penyelenggaraan Parade Forum Pembauran Kebangsaan</i>			1 Lap	200.000.000	
	<i>Peningkatan Kapasitas Wawasan kebangsaan</i>			1 Lap	200.000.000	<i>Peningkatan Kapasitas Wawasan kebangsaan</i>			1 Lap	200.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4	Pembentukan Paskibraka	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Paskibraka	80 orang	1.000.000.000	Pembentukan Paskibraka	Kab Mojokerto	Jumlah Paskibraka	80 orang	1.000.000.000	
	<i>Pembentukan Tim Pasukan Pengibar Bendera</i>							<i>Pembentukan Tim Pasukan Pengibar Bendera</i>			
1.5	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 laporan	200.000.000	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab Mojokerto	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 laporan	200.000.000	
	<i>Pembinaan bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>					<i>Pembinaan bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>					
1.6	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	80 orang	100.000.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab Mojokerto	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	80 orang	100.000.000	
	<i>Pengangkatan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>					<i>Pengukuhan Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>					
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi Masyarakat	78,70%	5.776.280.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Partisipasi Masyarakat	78,70%	5.776.280.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta Pemantauan Situasi Politik	3 sub keg	5.776.280.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jml sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta Pemantauan Situasi Politik	3 sub keg	5.776.280.000	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	462 orang	350.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab Mojokerto	Jml Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	462 orang	350.000.000	
	<i>Sosialisasi/Pendidikan Politik</i>			300 orang	139.776.400	<i>Sosialisasi/Pendidikan Politik</i>			300 orang	139.776.400	
	<i>Pembinaan Partai Politik</i>			162 orang	210.223.600	<i>Pembinaan Partai Politik</i>			162 orang	210.223.600	
1.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 orang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 orang	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)					Sosialisasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)					
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan ParPol, Pemilu/ Pemilukada Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Laporan	5.376.280.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto	Jml Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan ParPol, Pemilu/ Pemilukada Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Laporan	5.376.280.000	
	Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kab Mojokerto			1 Lap	150.000.000	Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Kab Mojokerto			1 Lap	150.000.000	
	Verifikasi Dana Bantuan Partai Politik			1 Lap	50.000.000	Verifikasi Dana Bantuan Partai Politik			1 Lap	50.000.000	
	Monev Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik			1 Lap	100.000.000	Monev Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik			1 Lap	100.000.000	
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Kab Mojokerto			11 Lap	5.076.280.000	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Kab Mojokerto			11 Lap	5.076.280.000	
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif	97,13%	795.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97,13%	795.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah LSM dan ORMAS yang terdaftar di Kab Mojokerto	275 LSM/ ORMAS	795.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab Mojokerto	Jumlah LSM dan ORMAS Yang Terdaftar	275 LSM/ ORMAS	795.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155 Orang	245.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155 Orang	245.000.000	
	Pembinaan LSM			75 orang	120.000.000	Pembinaan LSM			75 orang	120.000.000	
	Pembinaan ORMAS			80 orang	125.000.000	Pembinaan ORMAS			80 orang	125.000.000	
1.2	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155 orang	200.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	155 orang	200.000.000	
	Verifikasi dan Evaluasi Aktifitas LSM			75 orang	100.000.000	Verifikasi dan Evaluasi Aktifitas LSM			75 orang	100.000.000	
	Verifikasi dan Evaluasi Aktifitas ORMAS			80 orang	100.000.000	Verifikasi dan Evaluasi Aktifitas ORMAS			80 orang	100.000.000	
1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	350.000.000	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jml Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	350.000.000	
	Hibah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab Mojokerto			1 Lap	300.000.000	Hibah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab Mojokerto			1 Lap	300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Hibah LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kab Mojokerto			1 Lap	50.000.000	Hibah LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kab Mojokerto			1 Lap	50.000.000	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama	70%	300.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase kejadian terkait Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang terselesaikan	70%	300.000.000	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Sub Keg	300.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Sub Keg	300.000.000	
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320 orang	300.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320 orang	300.000.000	
	Rapat Koordinasi Tim FKUB			120 orang	200.000.000	Rapat Koordinasi Tim FKUB			120 orang	200.000.000	
	Sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)			200 orang	100.000.000	Sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)			200 orang	100.000.000	
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Penurunan Konflik Sosial di Kab Mojokerto	88,90%	890.000.000	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Konflik Sosial di Kab Mojokerto yang terselesaikan	88,90%	890.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	15 kejadian	890.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto	15 kejadian	890.000.000	
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dok	20.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dok	20.000.000	
	<i>Rapat koordinasi penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik di daerah</i>					<i>Rapat koordinasi penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik di daerah</i>					
1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dok	20.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jml Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, POA, TKA, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dok	20.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik di daerah</i>					<i>Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik di daerah</i>					
1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225 orang	350.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jml Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, POA, TKA dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	225 orang	350.000.000	
	<i>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</i>			95 orang	100.000.000	<i>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</i>			95 orang	100.000.000	
	<i>Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD)</i>			160 orang	250.000.000	<i>Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD)</i>			160 orang	250.000.000	
1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 orang	80.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	56 orang	80.000.000	
	<i>Pemantauan/Pengamanan Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru</i>				40.000.000	<i>Pemantauan/Pengamanan Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru</i>				40.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<i>Pemantuan Orang Asing</i>				40.000.000	<i>Pemantuan Orang Asing</i>				40.000.000	
1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	120.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	120.000.000	
	<i>Fasilitas Kerjasama Intelijen</i>			4 Lap	18.998.100	<i>Fasilitas Kerjasama Intelijen</i>			4 Lap	18.998.100	
	<i>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</i>			4 Lap	19.773.900	<i>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</i>			4 Lap	19.773.900	
	<i>Penanganan Unjuk Rasa</i>			10 Lap	81.228.000	<i>Penanganan Unjuk Rasa</i>			10 Lap	81.228.000	
1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Mojokerto Semua Kecamatan Semua Desa/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	300.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Kab Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	1 dok	300.000.000	
	<i>Pembinaan Wilayah</i>					<i>Pembinaan Wilayah</i>					
JUMLAH					14.511.638.000					14.511.638.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang kesatuan bangsa dan politik, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat belum terakomodir semua melalui Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025.

Berikut ini adalah beberapa usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), serta Partai Politik se Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi masyarakat dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian target. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berikut ini adalah hasil inventarisasi program dan kegiatan yang merupakan usulan/aspirasi para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4

(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-32)

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

(Dalam Rupiah)

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab Mojokerto			
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.294.240.000	
	RSK: Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab Mojokerto	Kab Mojokerto		5.294.240.000	Besaran hibah sesuai peraturan perundang-undangan
2.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto		350.000.000	Besaran hibah yang diberikan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
	RSK: Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1) MUI 2) LVRI Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab Mojokerto - Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kab Mojokerto		1.883.000.000 190.000.000 700.000.000 187.075.250 847.150.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan dan sasaran merupakan bentuk dan arah masa depan organisasi sehingga dapat mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan untuk memberikan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan dan sebagai gambaran masa depan yang diinginkan dalam periode perencanaan serta untuk mendukung dan mengawal visi dan misi Bupati Mojokerto terpilih periode 2021–2026.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan kebijakan penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto selain mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga merujuk pada kebijakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI memiliki 1 (satu) Program yaitu, Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik. Didalamnya terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Kesbangpol, dengan indikator kinerja berkaitan dengan urusan administrasi internet, serta koordinasi aparat Kesbang se-Indonesia.
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yang diarahkan pada pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa serta pendidikan kewarganegaraan.
3. Kewaspadaan Nasional yang diarahkan kepada manajemen konflik, penanganan dan penyelesaian konflik, dokumen laporan situasi kondisi politik se Indonesia, serta penyusunan rumusan kebijakan nasional berkenaan dengan kewaspadaan nasional.
4. Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan dengan indikator kinerja diarahkan pada :
 - a. Fungsi, peran, koordinasi, dan fasilitasi berkenaan dengan organisasi/ lembaga kemasyarakatan (seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan forum publik, penanganan masalah sosial serta perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan–kebijakan berkenaan dengan ketahanan seni, budaya agama dan kemasyarakatan.
 - b. Ketahanan Ekonomi dengan indikator kinerja diarahkan pada penyusunan rumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan ekonomi, fasilitasi, kerja sama, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, serta laporan stabilitas ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat.

5. Politik Dalam Negeri yang diarahkan pada pemilihan umum, partisipasi dan komunikasi politik, lembaga perwakilan, laporan dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri, pendidikan politik masyarakat serta penyusunan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan politik dalam negeri.

Merujuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Permendagri RI nomor 90 tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menerapkan beberapa kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Mojokerto, yaitu sebagai berikut :

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**, dengan indikator kinerja *Persentase Konflik Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila*, diarahkan pada Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap kemajemukan keanekaragaman budaya, adat melalui forum komunikasi dan silaturahmi antar tokoh etnis, suku dan budaya sehingga tercipta saling menghormati, saling kerjasama dalam kegiatan sosial bermasyarakat / sosial budaya demi mewujudkan kehidupan yang harmonis, bersatu, aman, tentram, dan damai demi menjaga tegaknya NKRI.
2. **Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**, dengan indikator kinerja *Persentase Partisipasi Masyarakat*, yang kegiatannya difokuskan pada pendidikan politik dan memberikan pemahaman atau pencerahan mengenai aspek-aspek hukum dan HAM bagi pelajar dan masyarakat serta pemantauan perkembangan politik di Kabupaten Mojokerto.
3. **Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**, dengan indikator kinerja *Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif*, Persentase Pembinaan dan Verifikasi Partai Politik, dengan kegiatan yang difokuskan pada pembinaan LSM dan ORMAS serta memverifikasi ORMAS dan partai politik di Kabupaten Mojokerto untuk memperoleh bantuan hibah keuangan.
4. **Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**, dengan indikator kinerja *Persentase Penurunan Konflik Umat Beragama*, diarahkan pada meningkatnya keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan.
5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**, dengan indikator kinerja *Persentase Penurunan Konflik sosial di Kabupaten Mojokerto*, dengan diarahkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan kondusifitas keamanan Kabupaten Mojokerto dan kesadaran masyarakat pada kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, dalam rangka

pencegahan, penanganan konflik dan pendataan serta pengawasan orang asing, hal tersebut meliputi fasilitasi terhadap forum-forum antara lain FKDM, FKDD, Pembinaan Wilayah, serta mengimplementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi ipoleksosbudkam.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, yaitu : *Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat.*

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, yaitu : *Meningkatnya Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, baik antar Suku, Agama, dan Golongan.*

Berdasarkan sasaran perangkat daerah tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto dalam mencapainya melakukan beberapa cara, antara lain:

- 1) Meningkatkan Peran serta masyarakat utamanya generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
- 2) Meningkatkan keamanan, ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh budayawan serta elemen masyarakat lainnya.
- 4) Meningkatkan iklim demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat di daerah.
- 5) Meningkatkan kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas/Parpol guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang kondusif.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintahan daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dari terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan 6 (enam) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
ada 2 sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
ada 1 sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
ada 6 sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Penyediaan Bahan/Material;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
ada 2 sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
ada 3 sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, terdapat satu kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan 6 sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan;
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- d. Pembentukan Paskibraka.
- e. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila.
- f. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, terdapat satu kegiatan dan tiga sub kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan 3 sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, terdapat satu kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

dengan 3 sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, terdapat satu kegiatan yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

dengan 1 Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pada program ini terdapat satu kegiatan, yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dengan 6 Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.1

(Dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, TC-33)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	(dalam Rupiah) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8					Urusan Pemerintahan Umum								
8	01				Kesatuan Bangsa Dan Politik								
					Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah								
8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81,00	3.350.358.000	Dana Alokasi Umum		81,00	3.350.358.000
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2				1	
8	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	95,00	15.000.000	Dana Alokasi Umum		94,75	15.000.000
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	3 dok	7.500.000	Dana Alokasi Umum		2 dok	7.500.000
					-Penyusunan Renstra								
					-Penyusunan Renja & Renja-P								
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	6 Lap	7.500.000	Dana Alokasi Umum		6 Lap	7.500.000
					-Penyusunan Laporan Evaluasi Renja (Triwulan)								

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					-Penyusunan LKjIP								
					- Penyusunan SAKIP								
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	96,97	2.853.108.000	Dana Alokasi Umum		97,25	2.853.108.000
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	16 Orang/bln	3.641.496.000	Dana Alokasi Umum		16 Orang/bln	2.853.108.000
					Belanja Gaji Pokok PNS + Gaji 13, dan THR				1.380.222.000				1.154.944.000
					Belanja Tunjangan PNS				481.732.000				113.176.000
					Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS				1.692.560.000				1.131.600.000
					Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan				86.982.000				90.582.000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	100	129.895.000	Dana Alokasi Umum		100	202.250.000
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	1 paket	20.000.000	Dana Alokasi Umum		2 paket	70.000.000
					Belanja Modal Peralatan Personal Computer								
					Belanja Modal Mebel (Kursi Rapat)								
8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	4 paket	13.500.000	Dana Alokasi Umum		4 paket	15.000.000
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat								
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	4 paket	9.000.000	Dana Alokasi Umum		4 paket	10.000.000
					Belanja Barang Cetak				6.000.000				7.000.000
					Belanja Penggandaan/ Fotocopy				3.000.000				3.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	1 Dok	9.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	9.055.000
						<i>Belanja Langganan Surat Kabar</i>				2.245.000				2.300.000
						<i>Belanja Jasa Iklan/Reklame</i>				6.755.000				6.755.000
8	01	01	2.06	0007		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	4 paket	18.395.000	Dana Alokasi Umum		4 paket	20.000.000
						<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>								
8	01	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	12 Lap	60.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	80.000.000
						<i>Perjalanan Dinas Biasa</i>				42.011.000				55.000.000
						<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>				17.989.000				25.000.000
8	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</i>	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	100	123.616.000	Dana Alokasi Umum		94	126.000.000
8	01	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	12 Lap	10.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	11.000.000
						<i>Belanja Rekening Telepon dan TV Berlangganan</i>								
8	01	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	12 Lap	113.616.000	Dana Alokasi Umum		12 Lap	144.000.000
						<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>				37.872.000				48.000.000
						<i>Penyediaan Jasa Administrasi umum</i>				56.808.000				72.000.000
						<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi</i>				18.936.000				24.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	97,95	81.626.000	Dana Alokasi Umum		97,80	125.000.000
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	6 unit	28.126.000	Dana Alokasi Umum		6 unit	35.000.000
					<i>Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (BBM, Servis, dll)</i>				11.278.500				18.918.400
					<i>Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional</i>				5.771.500				6.331.600
					<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>				11.076.000				9.750.000
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	1 unit	40.000.000	Dana Alokasi Umum		1 unit	75.000.000
					<i>Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor</i>								
8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bakesbangpol Kab. Mojokerto	7 unit	13.500.000	Dana Alokasi Umum		7 unit	15.000.000
					<i>Servis Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Gedung kantor</i>								
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		85,05%	832.003.152	Dana Alokasi Umum		85,09%	3.400.000.000
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		6 sub keg	832.003.152	Dana Alokasi Umum		6 sub keg	3.400.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	50 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum		400 orang	800.000.000
					<i>Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)</i>							100	250.000.000
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	50 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum		380 orang	900.000.000
					<i>Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda</i>							100	300.000.000
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab Mojokerto	1 Laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	400.000.000
												1 Lap	200.000.000
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab Mojokerto	80 orang	807.003.152	Dana Alokasi Umum		80 orang	1.000.000.000
					Pembentukan Tim/Pasukan Pengibar Bendera								
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab Mojokerto		0	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	200.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Pembinaan bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila								
8	01	02	2.01	0011		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kab Mojokerto	80 orang	0	Dana Alokasi Umum		80 orang	100.000.000
						Pengangkatan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila								
8	01	03				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat	Kab Mojokerto	84,50	5.310.181.901	Dana Alokasi Umum		78,73%	5.776.280.000
8	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu / Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab Mojokerto	3 sub keg	5.310.181.901	Dana Alokasi Umum		3 sub keg	5.776.280.000
8	01	03	2.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto	25 orang	5.000.000	Dana Alokasi Umum		462 orang	350.000.000
						Sosialisasi/Pendidikan Politik							300	139.776.400

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	03	2.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto	25 orang	10.000.000	Dana Alokasi Umum		80 orang	50.000.000
						<i>Sosialisasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)</i>								
8	01	03	2.01	0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/ Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab Mojokerto	10 Laporan	5.295.181.901	Dana Alokasi Umum		10 Laporan	5.295.181.901
						<i>Monev Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik</i>				941.901				941.901
						<i>Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Kab Mojokerto</i>			10 Lap	5.294.240.000			10 Lap	5.294.240.000
8	01	04				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif		97,15	1.880.000.000	Dana Alokasi Umum		97,25	795.000.000
8	01	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		3	1.880.000.000	Dana Alokasi Umum		3	795.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto	155 orang	100.000.000	Dana Alokasi Umum		155 orang	245.000.000
					<i>Pembinaan LSM & ORMAS</i>								
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto	155 orang	1.770.000.000	Dana Alokasi Umum		155 orang	1.770.000.000
					<i>Hibah untuk Ormas yang berbadan hukum indonesia dan yang diatur perundang-uandangan</i>								
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab Mojokerto	2 Laporan	350.000.000	Dana Alokasi Umum		2 Laporan	350.000.000
					<i>Monitoring dan Evaluasi aktifitas LSM dan ORMAS</i>								
8	01	05			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kejadian terkait Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang terselesaikan		70	300.000.000	Dana Alokasi Umum		10,50	300.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1 Sub Keg	300.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Sub Keg	300.000.000
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab Mojokerto	320 orang	300.000.000	Dana Alokasi Umum		320 orang	300.000.000
					Rapat Koordinasi Tim FKUB			120 orang	200.000.000			120 orang	200.000.000
					Sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)			200 orang	100.000.000			200 orang	100.000.000
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial di Kab Mojokerto yang terselesaikan		85%	890.000.000	Dana Alokasi Umum		87,00%	890.000.000
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto		15 kejadian	890.000.000	Dana Alokasi Umum		18	890.000.000
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab Mojokerto	1 Dok	2.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	20.000.000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					<i>Rapat koordinasi penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik di daerah</i>								
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Kab Mojokerto	1 Dok	20.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	20.000.000
					<i>Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik di daerah</i>								
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	225 orang	350.000.000	Dana Alokasi Umum		225 orang	350.000.000
					<i>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)</i>			95	100.000.000			95	100.000.000
					<i>Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD)</i>			160	250.000.000			160	250.000.000

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	01	06	2.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	56 orang	80.000.000	Dana Alokasi Umum		56 orang	80.000.000
						<i>Pemantauan/Pengamanan Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru</i>		Kab Mojokerto		40.000.000				40.000.000
						<i>Pemantuan Orang Asing</i>		Kab Mojokerto		40.000.000				40.000.000
8	01	06	2.01	0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab Mojokerto	18 Laporan	120.000.000	Dana Alokasi Umum		18 Laporan	120.000.000
						<i>Fasilitasi Kerjasama Intelijen</i>			4 Lap	18.998.100			4 Lap	18.998.100
						<i>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</i>			4 Lap	19.773.900			4 Lap	19.773.900
						<i>Penanganan Unjuk Rasa</i>			10 Lap	81.228.000			10 Lap	81.228.000
8	01	06	2.01	0006		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Mojokerto	1 Dok	300.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dok	300.000.000
						<i>Pembinaan Wilayah</i>								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
JUMLAH					14.511.638.000				14.511.638.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2025 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto akan melaksanakan 6 (Enam) program dengan indikator program sebanyak 6 (enam) dan 10 (sepuluh) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan, sebagaimana tersebut di tabel pada halaman berikutnya.

Tabel 4.1

**MATRIK PROGAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KODE PD : 8.01.01

NAMA PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	8	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80		3.991.633.000					
										Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1							
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai Sesuai Target		71,50	Bakesbangpol Kab Mojokerto	15.000.000					
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dok	Bakesbangpol Kab Mojokerto	7.500.000					
						Penyusunan Renstra												
						Penyusunan Renja dan Renja-P												
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Lap	Bakesbangpol Kab Mojokerto	7.500.000					
						Penyusunan Laporan Evaluasi Renja (Triwulan)												
						Penyusunan LKJIP												
						Penyusunan SAKIP												
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		96,55	Bakesbangpol Kab Mojokerto	3.641.496.000					
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/ bln	Bakesbangpol Kab Mojokerto	3.641.496.000					

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Belanja Gaji Pokok ASN							1.380.222.000					
						Belanja Tunjangan ASN							481.732.000					
						Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS							1.692.560.000					
						Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan							86.982.000					
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100	Bakesbangpol Kab Mojokerto	129.895.000					
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	Bakesbangpol Kab Mojokerto	20.000.000					
						Belanja Modal Peralatan Personal Computer												
						Belanja Modal Mebel (Kursi Rapat)												
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	Bakesbangpol Kab Mojokerto	13.500.000					
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan tamu												
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Bakesbangpol Kab Mojokerto	9.000.000					
						Belanja Barang Cetak							6.000.000					
						Belanja Penggandaan/ Fotocopy							3.000.000					
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		1 Dok	Bakesbangpol Kab Mojokerto	9.000.000					
						Belanja Langganan Surat Kabar							2.245.000					
						Belanja Jasa Iklan/Reklame							6.755.000					

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 Paket	Bakesbangpol Kab Mojokerto	18.395.000					
						<i>Belanja Alat Tulis Kantor</i>												
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	60.000.000					
						<i>Perjalanan Dinas Biasa</i>							42.011.000					
						<i>Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>							17.989.000					
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</i>		100	Bakesbangpol Kab Mojokerto	123.616.000					
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	10.000.000					
						<i>Biaya Rekening Telepon dan TV Berlangganan</i>												
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	Bakesbangpol Kab Mojokerto	113.616.000					
						<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>					2 orang		37.872.000					
						<i>Penyediaan Jasa Administrasi umum</i>					3 orang		56.808.000					
						<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi</i>					1 orang		18.936.000					
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>		98	Bakesbangpol Kab Mojokerto	81.626.000					

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional		6 unit	Bakesbangpol Kab Mojokerto	28.126.000					
						Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (BBM, Servis, dll)							11.278.500					
						Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional							5.771.500					
						Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin							11.076.000					
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	Bakesbangpol Kab Mojokerto	40.000.000					
						Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor												
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	Bakesbangpol Kab Mojokerto	13.500.000					
						Servis AC												
						Servis Laptop												
						Servis PC												
						Servis Printer												
						Servis Meubelier												
						Servis Sound System												
						Servis Alat Penghancur Kertas												
II	8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa				Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	85,00		832.003.152					

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3 sub keg	Kab Mojokerto	832.003.152					
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		50 orang	Kab Mojokerto	10.000.000					
						<i>Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)</i>												
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		50 orang	Kab Mojokerto	10.000.000					
						<i>Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda</i>												
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1 laporan	Kab Mojokerto	5.000.000					
						<i>Penunjang Forum Pembauran Kebangsaan</i>												
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka			Jumlah Paskibraka		82 orang	Kab Mojokerto	807.003.152					
						<i>Pembentukan Tim Pasukan Pengibar Bendera</i>												

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				Persentase Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	84,15		5.310.181.901					
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu / Pemilukada, serta Pemantauan Situasi Politik		3 sub keg	Kab Mojokerto	5.310.181.901					
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			Jml Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		25 orang	Kab Mojokerto	5.000.000					
						Sosialisasi/Pendidikan Politik												
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jml Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		25 orang	Kab Mojokerto	10.000.000					
						Sosialisasi Kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM)												

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		11 Laporan	Kab Mojokerto	5.295.181.901					
						Monev Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik					1 Lap		941.600					
						Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD Kab Mojokerto					10 Lap		5.294.240.000					
IV	8	01	04			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				Persentase LSM dan ORMAS Yang Aktif	97,13		1.880.000.000					
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Jumlah Pelaksanaan Kebijakan/ Kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		3		1.880.000.000					
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		155 orang	Kab Mojokerto	100.000.000					
						<i>Pembinaan LSM dan ORMAS</i>												

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		155	Kab Mojokerto	1.770.000.000					
						Hibah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kab Mojokerto							300.000.000					
						Hibah LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia) Kab Mojokerto							50.000.000					
						Hibah FKUB Kab Mojokerto							100.000.000					
						Hibah FPK Kab Mojokerto							100.000.000					
						Hibah Ormas yg memiliki surat keterangan terdaftar							150.000.000					
						Hibah Ormas yg Berbadan Hukum Indonesia							1.320.000.000					
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1 Laporan	Kab Mojokerto	10.000.000					
						Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Aktivitas LSM/ORMAS												

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	8	01	05			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				Persentase kejadian terkait Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang terselesaikan	70%		104.000.000					
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			Jumlah sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1 sub keg	Kab Mojokerto	104.000.000					
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		320 orang	Kab Mojokerto	104.000.000					
						Rapat Koordinasi Tim FKUB					75 orang		200.000.000					
						Sosialisasi P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika)					100 orang		100.000.000					
VI	8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				Persentase Konflik Sosial di Kab Mojokerto yang terselesaikan	88,90	%	245.000.000					
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Jumlah Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Mojokerto		15 kejadian		245.000.000					

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 dok	Kab Mojokerto	5.000.000					
						<i>Rapat koordinasi penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik di daerah</i>												
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		1 dok	Kab Mojokerto	5.000.000					
						<i>Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Penanganan Konflik di daerah</i>												
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		190 orang	Kab Mojokerto	60.000.000					
						<i>Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD)</i>												

No	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
									OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		56 orang	Kab Mojokerto	55.000.000					
						<i>Pemantauan/Pengamanan Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru</i>							30.000.000					
						<i>Pemantuan Orang Asing</i>							25.000.000					
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		18 Laporan	Kab Mojokerto	120.000.000					
						<i>Fasilitasi Kerjasama Intelijen</i>					4 Lap		40.000.000					
						<i>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</i>					4 Lap		40.000.000					
						<i>Penanganan Unjuk Rasa</i>					10 Lap		40.000.000					
JUMLAH													12.362.818.053					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum. Renja juga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta kerjasam seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Dengan adanya Rencana Kerja ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi kepala daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah yang membidangi fungsi lain.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto pada tahun lalu akan menjadi acuan kedepan untuk lebih ditingkatkan agar tercapai visi dan misi yang diemban.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, agar program/ kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategik (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun *action plan* yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten di tingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto.

Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto merupakan suatu proses perencanaan tahunan yang hendak dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, Renstra SKPD/OPD 2021-2026, dan disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Dengan harapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sebagai acuan untuk mencapai target kinerja.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto tahun 2025 disusun dan semoga penyusunan ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta harapan pemerintah serta masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. Nugraha Budhi Sulistya, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196909151989031003